

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia Internasional, saat ini isu lingkungan serta perubahan iklim menjadi salah satu hal yang cukup diperhatikan. Isu perubahan lingkungan sering kali dibahas dalam berbagai agenda internasional, ditambah isu mengenai perubahan lingkungan dianggap menjadi salah satu ancaman untuk keamanan manusia, terutama pada isu perubahan iklim serta pemanasan global, dimana isu ini menjadi salah satu isu utama baru setelah ekonomi dan keamanan nasional. Isu lingkungan dalam hubungan internasional mulai diangkat pada tahun 1970-an, dikarenakan saat itu aktivitas politik serta sosial ekonomi menyebabkan adanya eksploitasi dan degradasi terhadap lingkungan yang berlebihan.¹

Topik lingkungan semakin banyak muncul dalam agenda internasional. Pertambahan jumlah penduduk di dunia meyakinkan kita bahwa aktivitas manusia, mengancam lingkungan. menjadi masalah besar dan harus memiliki perhatian khusus, karena perubahan iklim telah mempengaruhi dunia. Sangat penting untuk memperkuat intervensi kesehatan masyarakat inti di bidang manajemen sektor, perlindungan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan lebih memperhatikan faktor lingkungan dan sosial ekonomi yang sehat. Masalah lingkungan ini tidak hanya akan menjadi tanggung jawab negara sebagai subjek, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari

¹ John Baylis & Steve Smith., 2011. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation fifth edition. UK: Oxford University Press.

aktor internasional lainnya, termasuk individu, perusahaan multinasional, serta organisasi internasional dan non-negara.²

Maka dari itu pada COP 2005 di Montreal, Kanada, REDD+ ditetapkan sebagai sistem global yang memberikan insentif kepada negara berkembang untuk melindungi hutan bagi pemilik hutan seperti Indonesia. Rencana tersebut dibahas hangat dalam putaran negosiasi iklim. Papua Nugini dan Kosta Rika merupakan dua negara yang mengembangkan REDD+, karena merasa tidak diuntungkan oleh regulasi Protokol Kyoto. Seperti pada dua regulasi Protokol Kyoto, Emissions Trading (ET) dan Joint Implementation (JI), hanya berlaku untuk negara maju atau negara Annex I. Skema lain dari Protokol Kyoto, yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM), yang menargetkan negara-negara berkembang, tetapi dibatasi hingga kurang dari 1% dari total emisi tahunan negara-negara maju yang menginvestasikan proyek CDM di negara-negara berkembang.³ Lalu COP-13 pada tahun 2007 yang berlangsung di Bali, uji coba REDD+ dilakukan di Indonesia dengan sebutan REDD+-I atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia yang melibatkan Aliansi Iklim Hutan Indonesia yang merupakan kelompok penelitian yang dipimpin oleh Departemen Kehutanan Indonesia termasuk peneliti dari lembaga nasional dan internasional yang akhirnya menyebabkan terbentuknya skema REDD+, maka dari itu Indonesia secara langsung dianggap terlibat

² Pan American Health Organization, 2012. The Environment And Human Security. In: Health in the Americas. USA: Pan American Health Organization.

³ Nadhea Lady., 2018. Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. Global Political Studies Journal, 2(1), pp. 24-40.

dalam mekanisme REDD+ sejak munculnya program tersebut. Pada COP-20 di Pittsburgh pada 2009, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu merupakan presiden Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha nasional, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional, pada tenggat waktu tahun 2020.⁴

Komitmen Indonesia ini dianggap menjadi salah satu komitmen yang cukup memiliki nilai yang cukup besar di mata internasional, Indonesia dianggap membutuhkan bantuan negara untuk berhasil mencapai target penurunan emisi. Upaya penurunan emisi secara besar-besaran telah disambut baik oleh beberapa pemangku kepentingan, termasuk Norwegia yang merupakan negara industri besar yang siap memberikan dukungan finansial untuk mencapai target deforestasi dan penurunan emisi Indonesia yang meningkat.⁵

Norwegia sendiri menjadi salah satu negara maju yang mendukung penuh upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan melindungi hutan, seperti yang direncanakan oleh program REDD+. Norwegia dianggap sebagai negara industri yang sangat maju di dunia. Ekonomi Norwegia berasal dari sumber daya alam serta keterlibatan Norwegia dalam industri Eropa Barat. Seperti pada industri minyak lepas pantai yang telah memainkan peran dominan dalam perekonomian Norwegia sejak tahun 1970. Terdapat perhatian khusus Norwegia dalam masalah lingkungan yang

⁴ Fajar Shidiq., 2014. Latar Belakang Australia Melakukan Kerjasama Dengan Indonesia Melalui Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Periode 2008-2012.. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁵ Mahardy Azhar Aiman., 2014. Kerjasama Norwegia dan Indonesia Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema REDD+. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, XII(1), pp. 1-15.

diangkat sebagai agenda politik luar negeri. Yaitu salah satu agenda politik luar negeri Norwegia dalam pengelolaan strategi High North Norway dan agenda iklim serta lingkungan hidup. Karena secara geografis dekat dengan Lapisan Es Antartika, hal ini membuat Norwegia sangat peduli dengan lingkungan global, yang dapat mempengaruhi perubahan iklim di wilayah Norwegia Utara atau ujung utara di mana terdapat kandungan gas dan minyak di daerah tersebut. wilayah Laut Utara. lebih mudah dijangkau saat es mencair. Sayangnya, efek iklim global saat ini telah mengakibatkan berkurangnya lapisan es laut Antartika. Mencairnya es laut adalah masalah utama bagi negara-negara yang dekat dengan lapisan es Antartika, termasuk Norwegia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lingkungan di Norwegia untuk memastikan bahwa industri tidak berbenturan dengan lingkungan. Dan Norwegia juga merupakan negara yang termasuk dalam kelompok Annex 1 UNFCCC. Negara Annex 1 harus mengurangi emisi gas rumah kaca.⁶

Oleh karena itu, Norwegia berkewajiban untuk mengeluarkan pedoman dan bekerja sama dengan negara lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme yang dikeluarkan oleh UNFCCC. Untuk memenuhi komitmen ini, Norwegia telah mengumumkan rencana aksi untuk mengurangi emisi sebesar 30% pada tahun 2020. Rencana tersebut didukung oleh beberapa program, antara lain dukungan keuangan bagi negara berkembang dalam melaksanakan program REDD+ dan kerjasama dengan negara pemilik hutan hujan untuk mengurangi emisi gas rumah

⁶ Kedutaan Besar Norwegia-Jakarta, n.d. Strategi High North Norwegia. [Online]. Available at: http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Politik-LuarNegeri/Ujung-Utara/Strategi-High-North-Norway/.

kaca. Salah satu cara yang dilakukan Norwegia yaitu dengan menjanjikan bantuan sebesar US\$500 juta dan secara berFase untuk mendukung program REDD+ di negara berkembang.⁷

Pada tahun 2007 Indonesia dan Norwegia membangun kerjasama bilateral dalam bidang lingkungan. Salah satu hutan yang menjadi hutan percontohan menjelang agenda REDD+ ialah hutan Kalimantan di tahun 2010. Pada 2013 dibentuk Badan Pengelola REDD+ berdasarkan Peraturan Presiden No.62/2013. Badan Pengelola REDD+ ini bertugas mengabarkan langsung kepada presiden, dan berfungsi sebagai bagian setingkat kementerian yang digerakkan oleh 1 ketua, 4 representatif dan 60 tenaga professional. Sebagian besar dari pelaksanaan kerjasama lingkungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia yang mencakup juga pembayaran jasa dari Norwegia sebesar 1 miliar USD untuk Indonesia jika berhasil menyusutkan emisi di sektor kehutanan, Perjanjian tersebut termuat bagian dalam LoI (*Letter of Intent*) Indonesia-Norwegia.⁸ Berdasarkan dokumen Stranas REDD+ Indonesia memasuki babak implementasi REDD+, yang buntutnya terbagi menjadi 3 fase Fase 1 dimana merupakan fase persiapan, lalu Fase 2 yaitu fase transformasi, dilanjut Fase 3 yang merupakan fase implementasi penuh. Adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Norwegia idealnya memberikan peranan terhadap cara Indonesia dalam mengurangi laju deforestasi dan menurunkan perhitungan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020. Namun yang tampak hingga kurun ini, capaian pengurangan laju

⁷ *Ibid*

⁸ Azalia Izzah Laila Ramadhani., 2016. Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Tahun 2010- 2016. Sumedang, Universitas Padjadjaran

deforestasi Indonesia masih belum mendekati sasaran dan kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia pun masih menemui berbagai kendala dan hambatan.

Dalam LoI di tuliskan tujuan dan fokus dari kerjasama ini merupakan bentuk kontribusi pada pengurangan signifikan terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut. Melakukan Koordinasi tersusun inisiasi REDD+ dengan tetap memastikan keberlanjutan dan integrasi ekonomi, sosial dan lingkungan dari upaya ini.⁹ Lalu dijelaskan pada Fase pertama, dilakukan persiapan implementasi REDD+ dengan menyelesaikan strategi nasional yang juga menjadi pendorong utama dalam menangani emisi terkait hutan dan lahan gambut, lalu membentuk badan khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan REDD+. Fase kedua, difokuskan kepada kemampuan pembangunan nasional untuk pengembangan dan implementasi hukum serta kebijakan yang sudah dibuat difase sebelumnya, lalu meningkatkan lokasi percontohan REDD+. Pada fase ini diharapkan adanya peningkatan penerapan dalam kebijakan, seperti penegakan hukum terhadap pembalakan liar serta perdagangan kayu. Pada Fase ke-3, Implementasi penuh harus sudah dilakukan, dengan begitu Indonesia dapat menerima kontribusi tahunan setelah pengurangan emisi nasional diverifikasi sesuai dengan referensi yang diberikan oleh UNFCCC. Selanjutnya Norwegia dapat menyalurkan kontribusi keuangan yang dijelaskan pada fase sebelumnya.¹⁰

⁹ Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010. Letter of Inten: Cooperation on reducing greenhouse emission from deforestation and forest degradation, J: s.n.

¹⁰ *Ibid*

Tabel 1.1 : Indikator Penurunan Emisi GRK Nasional

Tujuan Kerjasama	Tercapai	Belum tercapai	Keterangan
Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan/atau lahan gambut sebanyak: <ul style="list-style-type: none"> • 26% - Tanpa bantuan Luar Negeri. • 41% - Dengan Bantuan Luar Negeri. 		V	Hingga 2020 penurunan telah mencapai 26% dengan bantuan Luar Negeri, capaian ini tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar 41% dengan bantuan luar negeri.
Menjaga dan meningkatkan cadangan karbon melalui konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan/atau rehabilitasi atau restorasi kawasan hutan yang rusak		V	Pengelolaan hutan yang dilakukan kurang mumpuni. hingga 2020 tercatat hutan Indonesia menyusut tinggal 120,3 juta hektar.
Memberikan manfaat bagi peningkatan jasa lingkungan, keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat lokal/adat		V	Tidak jelasnya pengaturan hak tenurial hutan dan tanah; tidak ada kesepakatan atas siapa yang mempunyai hak untuk memiliki, mengakses atau mengontrol hutan Indonesia. hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dengan masyarakat adat setempat.

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Dengan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia karena tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang merupakan akibat kegiatan kebakaran hutan, penebangan liar, kebutuhan akan hasil hutan yang tinggi yang terjadi pada skala lokal, nasional dan global, perubahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan lain-lain. Membuat beberapa penulis memiliki beberapa ketertarikan mengenai isu degradasi hutan dengan mengangkat kerjasama antara Indonesia-Norwegia ini.

Seperti Riza Aryani menganalisa kegagalan implementasi REDD+ pada proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah tahun 2008 hingga 2010 menyatakan REDD+ ada sebagai bentuk perubahan dalam paradigma pengelolaan hutan, bukan sebagai alat dalam pembuatan kebijakan baru pada setiap kasus yang berbeda. Dengan tantangan yang multilevel yang dimiliki dalam pengaplikasian REDD+, dimana di tingkat nasional, paradigma REDD+ yang berkembang adalah perhitungan ekonomi semata. REDD+ juga memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mengesampingkan dampak negatifnya, jika dibandingkan dengan usaha sawit, Proyek ini dianggap lebih beresiko, hal ini menjadi salah satu diperhitungkan oleh pemerintah. Menggunakan *Earth System Governance*, Aryani menjelaskan bagaimana akhirnya Pemerintahan dapat membuat kebijakan baru untuk permasalahan pada sektor non-formal, seperti hubungan antar actor dalam upaya mitigasi dampak global dari kerusakan

lingkungan.¹¹ Hal ini membantu dalam menunjukkan awal mula REDD+ di Indonesia melalui proyek Rimba Raya ini. Tulisan ini memperlihatkan sudut pandang yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh beberapa peneliti lainnya.

Lalu disampaikan oleh Delvia Susanti yang dalam Skripsinya yang membahas bagaimana implementasi diplomasi lingkungan antara Indonesia Norwegia dalam kurun waktu 2011 hingga 2020 menyampaikan bahwa Indonesia dan Norwegia bermitra melalui program REDD+ untuk berhasil menurunkan emisi karbon secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2020.¹² Dengan menggunakan teori *Market-based Environmental Policy Instruments* yang membantu penjelasan bagaimana jual beli karbon dalam kerjasama ini berjalan. Yang akhirnya memperlihatkan bagaimana kerjasama ini berjalan melalui sudut pandang ekonomi.

Selain itu, Azalia Izzah Laila dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama Indonesia – Norwegia dalam skema reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) tahun 2010-2016” menyatakan Indonesia dan Norwegia memiliki titik temu dalam mengatasi deforestasi hutan, namun ada tanggung jawab yang berbeda, yang akhirnya mendorong adanya kerjasama ini terlaksana. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, skripsi ini menjelaskan bagaimana program program yang terjadi dalam kurun waktu tersebut terlaksana, meski kerjasama REDD+

¹¹ Riza Aryani., 2012. menganalisa kegagalan Implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah tahun 2008 hingga 2010. Depok: Universitas Indonesia.

¹² Delvia Susanti., 2021. Diplomasi Lingkungan Norwegia Kepada Indonesia: Analisa Skema Reducing Emission From Deforestation Forest Degradation Plus tahun 2011- 2020. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.

antara Indonesia dan Norwegia pun masih menemui berbagai kendala dan hambatan.¹³ Penelitian ini membantu penulis dalam melengkapi data serta melihat cara pandang yang berbeda dengan konsep yang disuguhkan dalam penelitian ini. Meski focus pada penelitian ini melihat bagaimana program ini berjalan melalui sudut pandang Poverty, Natural hazards, Atmosphere, Land, Biodiversity, dan Economic development.

Nur Faghmarul dalam jurnalnya yang mengkaji program REDD+ dalam kerjasama Norwegia dan Indonesia, menyatakan upaya yang dilakukan norwegia dalam kerjasama ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Norwegia sebagai solusi kontribusi emisi yang dihasilkan oleh pengeboran minyak dan gas bumi oleh industry-industri mereka. Sedangkan Indonesia dapat dikatakan melakukan kerjasama ini sebagai salah satu langkah dalam memperbaiki kebijakan kehutanan nasional, dan membuat Indonesia sebagai salah satu bagian dari rezim Internasional yang membantu dalam mewujudkan pengurangan emisi sebanyak 41 persen pada tahun 2020.¹⁴ Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana jalannya kerjasama ini di tiap fase.

Dan juga Nadhea Lady, dalam jurnalnya yang berjudul kerjasama indonesia – norwegia melalui skema (REDD+) dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia menyatakan bahwa sampai sejauh ini, Kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dinilai berhasil, program REDD+ berperan dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia, terbukti dengan hasil moratorium pertama yang menunjukkan 16,57% atau

¹³ Azalia Izzah Laila Ramadhani., 2016. Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Tahun 2010- 2016. Sumedang, Universitas Padjadjaran

¹⁴ N Fagmarul., 2017. Meng kaji Program REDD+ (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation) Plus dalam Kerjasama IndonesiaNorwegia, Surabaya: Universitas Airlangga.

489.000 juta ton perlindungan hutan di Indonesia. CO2 untuk penyerapan GRK, meskipun pelaksanaan semua program yang termasuk dalam fase LoI, belum semua terlaksana dikarenakan terdapatnya masalah-masalah yang belum terselesaikan.¹⁵ Sedangkan salah satu kendala teknis adalah kendala kultural yang berasal dari masyarakat adat Indonesia dan kendala kebijakan dalam perlindungan hutan Indonesia.

Kemudian muncul pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi kerjasama ini? Penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala yang dialami dalam menurunkan laju deforestasi hutan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis mengenai kendala kerjasama Indonesia-Norwegia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui skema REDD+ dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil suatu perumusan masalah sebagai berikut :

“Apa saja faktor yang menghambat Implementasi REDD+ dalam kerjasama Indonesia-Norwegia kurun tahun 2011-2016?”

¹⁵ Nadhea Lady., 2018. Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. *Global Political Studies Journal*, 2(1), pp. 24-40.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan gelar S1 Jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan apa saja yang merupakan faktor penghalang jalannya Kerjasama Indonesia – Norwegia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan skema REDD+ dalam kurun waktu 2011-2016. Penelitian ini akan berfokus pada penjelasan faktor faktor penghambat program-program kerjasama Indonesia-Norwegia yang telah berjalan dalam upaya menurunkan laju deforestasi di Indonesia selama jangka waktu 2011-2016. Peneliti ini juga akan melihat apakah kerjasama yang menggunakan skema REDD+ ini memberikan kontribusi nyata terkait upaya kedua negara untuk menekan laju deforestasi hutan di dunia, serta sesuai dengan pencapaian persetujuan diawal

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerjasama Lingkungan

Setelah Perang Dingin, interaksi antar negara di seluruh dunia mulai bergeser dari yang awalnya konfrontatif dan kompetitif menjadi lebih bersifat kerjasama atau hubungan timbal balik. Kerjasama internasional terjadi ketika seorang aktor (negara) terjerumus ke dalam situasi dimana kebijakan masing-masing aktor untuk menjalankan kepentingannya sendiri (terlepas dari kepentingan aktor lain) dipandang oleh aktor lain

sebagai hambatan untuk mencapai tujuannya.¹⁶ Ketika saling ketergantungan antar negara tumbuh, negara-negara akan membentuk organisasi internasional untuk mengatasi masalah bersama.¹⁷ Organisasi internasional berperan dalam mengembangkan kerjasama lintas batas dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Berdasarkan negara peserta, kerjasama internasional dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Kusumohamidjojo menjelaskan tentang definisi hubungan bilateral, yakni:¹⁸

“Suatu bentuk kerjasama diantara dua negara yang berdekatan secara geografis maupun yang letaknya berjauhan di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.”

Kerjasama bilateral menggambarkan hubungan bilateral yang saling mempengaruhi dan membahas kelanjutan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua negara di masa mendatang. Kesepakatan yang dihasilkan dari kerjasama bilateral ini dapat memainkan peran penting dalam berbagai negosiasi dan juga dapat memberikan pertukaran institusi tertentu antara kedua negara untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

¹⁶ K.J Holsti., 1988. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis. Jakarta: Erlangga. Jackson, R. & Sorensen, G., 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁷ Keohane, R. O. & R. A., 1985. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. In: World Politics. New Jersey: Princeton University Press, pp. 226- 254.

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo., 1987. Hubungan internasional kerangka studi analitis. Bandung: Bina Cipta.

¹⁹ *Ibid*

Dalam era ini, bidang kerjasama bilateral berkembang, dimana bukan lagi soal politik, militer, dan ekonomi. Krisis keanekaragaman hayati dan perubahan iklim saat ini juga membutuhkan tindakan global segera. Semakin pentingnya isu-isu yang terkait dengan lingkungan global dalam hubungan internasional telah disertai dengan multiplikasi negosiasi, yang melibatkan negara-negara besar politik, ekonomi dan strategis.²⁰ Dalam hal ini, kerjasama lingkungan dan langkah-langkah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam negosiasi lingkungan, untuk berkontribusi pada perlindungan dunia, dan untuk mengimplementasikan rencana aksi dari konvensi lingkungan. Kerjasama lingkungan internasional adalah usaha yang relatif baru, muncul dalam bentuknya yang sekarang diakui selama seabad terakhir dan hanya menjadi bagian penting dari hubungan internasional dalam tiga atau empat tahun terakhir.²¹ Dalam perjalanan sejarahnya yang singkat, permasalahan kerjasama antar negara yang terkait dengan lingkungan telah mengalami perubahan, demikian pula dengan karakteristik lembaga yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa perubahan tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, isu lingkungan yang ditangani secara internasional menjadi lebih kompleks, baik lingkungan maupun politik. Namun, seiring waktu, jenis masalah lingkungan yang ditangani secara internasional telah berubah, seperti halnya struktur insentif para aktor yang perilakunya perlu diubah untuk mengurangi masalah lingkungan yang terkait.²²

²⁰ Chuka Enuka., 2018, *Dependency Theory and Global Economic Imbalance: A Critique*, UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities. Vol. 19 No. 1

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

dijelaskan oleh Oran R. Young dalam artikelnya ada beberapa hal yang mempengaruhi jalannya kerjasama lingkungan, yang melihat apakah kerjasama tersebut cukup efektif atau tidak, yang dilihat dari beberapa faktor yang menghubungkan dengan bagaimana kerjasama tersebut berjalan.

Tabel 1.2 : Indikator Efektivitas Kerjasama Lingkungan

Indikator		Efektif/Tidak Ada Hambatan	Tidak Efektif/Ada Hambatan	
Internal	Birokrasi	Surat Pernyataan Niat	Pembuatan LoI sesuai dengan kesepahaman serta kesamaan tujuan.	Adanya ketidakpahaman dalam menjalankan kerjasama.
		Komitmen	Menjalankan program kerja sesuai dengan yang sudah disepakati, dengan harapan capaian yang sesuai.	Melewatkan beberapa hal dalam menjalankan komitmen.
		Partisipasi Pihak lain	Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, serta masyarakat adat sekitar.	kurangnya komunikasi serta kerjasama terhadap masyarakat sekitar.
	Sumber daya dan Hasil	Hubungan Timbal Balik	Adanya kepercayaan satu sama lain, serta menjaga komitmen sesuai kesepakatan.	Adanya ketidakpercayaan satu dengan yang lain.
		Hasil Nyata	Tercapainya hasil yang telah	Tidak adanya hasil dalam

			disepakati, terjadinya perubahan dalam hal hal pokok dalam lingkungan (Pengurangan dalam Emisi GRK, Deforestasi, dan Degradasi).	kerjasama.
	Anggaran	Dana kesepakatan	Pencairan dana sesuai yang sudah disepakati.	Kurang maksimal dalam pencairan dana kesepakatan.
Eksternal	Paradigma nasional	Undang undang dan peraturan pemerintah	Adanya dukungan melalui peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah, mengenai pengurangan deforestasi dan degradasi.	Tidak adanya Undang undang dalam menjalankan kerjasama.
	Kondisi Internasional	Terjadi krisis dunia saat jalannya kerjasama	Tidak Terdapat Kejadian Internasional yang berpengaruh.	Terdapat Kejadian Internasional yang berpengaruh.

Sumber: Oran R. Young. Effectiveness of international environmental regimes: Existing knowledge, cutting-edge themes, and research strategies.

Dalam kasus perubahan iklim, beberapa hal mempengaruhi kerja sama lingkungan, misalnya; Konflik antara penanganan Isu lingkungan dengan kebijakan negara, jika ingin menangani masalah lingkungan negara harus menggunakan teknik mitigasi dan strategi adaptasi yang mahal serta menurunkan tingkat pertumbuhan

ekonomi mereka - semua ini membebankan biaya pada masing-masing negara bagian. Selain itu, negara-negara yang lebih maju secara ekonomi harus menanggung biaya ekonomi yang lebih besar, sehingga mereka akan semakin enggan untuk melakukan tindakan. Lalu Kondisi Ekonomi juga menjadi hambatan, dimana negara tidak memiliki dana yang cukup memadai dalam menanggapi perubahan iklim memiliki akar struktural yang jauh lebih dalam, dan bukan hanya tentang sulitnya mencapai kerjasama internasional. Dan juga Adanya perbedaan sistem social, dimana kebanyakan negara berkembang memiliki berbagai struktur atau sistem sosial yang lebih rumit dibandingkan dengan negara besar.²³

1.4.2 Sustainable Development dan Triple Bottom Line

Sustainable Development dianggap sebagai suatu proses pembangunan yang memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia dan ditangani oleh manusia. Secara umum, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai tanda bahwa suatu negara maju dalam hal struktur sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, pembangunan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mereka tanpa menghambat perkembangan generasi berikutnya. Komisi Brundtland menyatakan; “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”²⁴

²³ swantree.org, 2021. Obstacles to international cooperation on climate change. [Online] Available at: <https://swantree.org/obstacles-to-international-cooperation-onclimate-change/>

²⁴ Brundtland Commission, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development, s.l.: United Nations.

Dalam laporannya Komisi Brundtland menyatakan bahwa Kemanusiaan memiliki kapasitas untuk membuat pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.²⁵ Akhirnya Sustainable Development menjadi paradigma pembangunan yang sering digunakan oleh organisasi internasional dan pemerintah sebagai jargon perencanaan pembangunan, tema konferensi dan makalah akademis, selain itu para aktivis lingkungan dan pembangunan menggunakan konsep ini sebagai slogan dan pegangan mereka. Konsep ini tampaknya telah menarik banyak perhatian yang tidak dimiliki oleh konsep pembangunan lainnya, dan juga akan tetap menjadi paradigma pembangunan umum untuk waktu yang lama.²⁶

Lalu ada tiga dimensi yang memiliki andil penuh dalam pembangunan berkelanjutan. Yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, ketiga dimensi itu disebut sebagai Triple Bottom Line, dimana dijelaskan bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan jika Tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan terpenuhi. Selain itu, ini juga berfokus pada bagaimana membangun kondisi sosial masyarakat yang lebih baik, tetapi juga keberlanjutan kondisi lingkungan. John Elkington dalam bukunya menyatakan “The Triple bottom line wasn’t designed to just an accounting tool. It’s was supposed to provoke deeper thinking about capitalism and its future” yang dapat diartikan bahwa Triple bottom line adalah kerangka transformasi untuk bisnis dan organisasi lain untuk membantu mereka

²⁵ Ibid

²⁶ Mensah, J., 2019. Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, pp. 2- 5

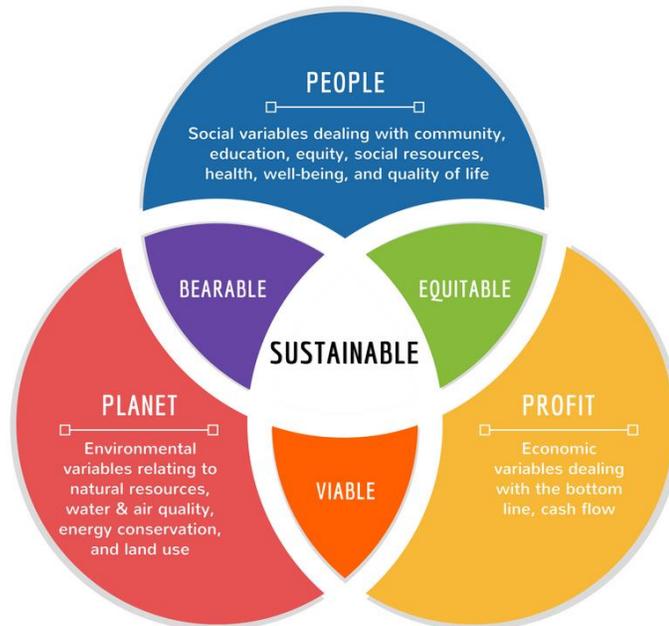
bergerak menuju masa depan yang regeneratif dan lebih berkelanjutan. Triple bottom line membantu dalam membuat tolok ukur, menetapkan tujuan, serta meningkatkan tujuan, dan akhirnya berkembang menuju sistem yang lebih berkelanjutan (Elkington, 1997).²⁷

Triple bottom line menggambarkan bahwa jika sebuah organisasi hanya berfokus pada keuntungan dan mengabaikan manusia dan planet tidak akan berhasil usahanya dalam jangka panjang. Elkington menyarankan perusahaan global untuk mengingat aspek lain dari aktivitas bisnis mereka selain keuntungan. Melihat dunia yang berubah dengan cepat, Elkington percaya bahwa perusahaan multinasional perlu mencari alternatif lain untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk tidak lagi berpijak pada single bottom line, yaitu profit semata, pandangan akan sosial dan lingkungan sangatlah dibutuhkan²⁸

²⁷ John Elkington., 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*.

²⁸ *Ibid*

Gambar 1.1: Triple Bottom Line



Sumber: SHS Web of Conferences

Secara garis besar, Triple bottom line mengharapakan adanya keseimbangan dalam penentuan keputusan, demi masa depan. Maka 3 pilar yang harus diperhatikan yaitu; 1.) Pilar Ekonomi, dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam kegiatan usaha tanpa adanya keuntungan maka pembangunan dan tidak dapat berjalan dan beroperasi. 2.) Pilar social, kesejahteraan masyarakat sekitar wajib diperhatikan. Masyarakat digambarkan sebagai salah satu pemegang kekuasaan, karena dengan adanya dukungan masyarakat pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik. 3.) Pilar Lingkungan, Pembangunan dan Lingkungan selalu memiliki hubungan sebab akibat dimana hal ini membuat suatu pembangunan diharuskan menjaga kondisi

lingkungannya, dimana hal ini kondisi lingkungan akan mempengaruhi keadaan di masa depan.²⁹

Ketika negara melakukan pembangunan dengan menerapkan konsep ini, maka pembangunan akan dianggap sebagai pembangunan yang sustainable, dengan tujuan sebagai pembangunan yang berkelanjutan tanpa merugikan pihak manapun. Triple Bottom Line membantu menjelaskan apakah kerjasama ini berjalan dengan baik atau tidak, selain itu tiga pilar utama triple bottom line membantu dalam menjelaskan hambatan dalam program kerjasama ini. Maka dari itu konsep pembangunan berkelanjutan dengan aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan yang saling beririsan masih sangat relevan untuk menjadi acuan dalam pengelolaan kondisi lingkungan. Pada pilar Ekonomi, ekonomi yang dapat tumbuh adalah ekonomi restoratif dimana pertumbuhan ekonomi yang bersifat memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak serta ekonomi konservatif yang mempertahankan kondisi lingkungan yang baik. Kemudian pilar sosial meliputi bebas kemiskinan, bebas kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender dan HAM. Pada hakekatnya, tujuannya adalah untuk mencapai perwujudan hak asasi manusia yang adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pilar lingkungan ini mencakup unsur-unsur produksi yang bertanggung jawab, mitigasi perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

²⁹ University of Wisconsin, 2022. The Triple Bottom Line. [Online] Available at: <https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/>

berkelanjutan dalam mendukung semua kehidupan.³⁰ Dimana melalui indikator tersebut diharapkan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:³¹

Pilar ekonomi sendiri didasarkan pada beberapa indikator, seperti: Pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuai rencana. Pertumbuhan ekonomi ini masuk akal tidak hanya untuk negara, perusahaan atau promotor, tetapi juga untuk masyarakat setempat. Efisiensi, yang mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu program dengan benar. Efisiensi di sini lebih kepada ketepatan waktu pencapaian target. Stabilitas mengacu pada stabilitas sosial-politik negara. Pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan di bawah kondisi kerangka sosial-politik yang stabil.

Pilar sosial mengasumsikan bahwa pekerjaan adalah kegiatan pembangunan, bisa dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan, ketika kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga secara langsung memungkinkan penduduk setempat untuk bekerja sebagai pekerja dalam kegiatan tersebut. Keadilan berarti kesetaraan antara pekerja dan masyarakat. Dalam hal ini, kesetaraan yang dimaksud adalah konsep akses ekonomi dan sosial yang perlu dicapai oleh masyarakat lokal. Kemudian keamanan, dalam pelaksanaan program aksi pembangunan, negara harus mampu memberikan jaminan yang baik bagi kelangsungan program, pegawai dan masyarakat sekitar, yang juga berdampak pada

³⁰ Janta Supriatna, 2021. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³¹ Junjung Rajasa, 2018. Efektivitas Kerjasama United Nations REDD Programme tahun 2011-2013 terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Universitas Brawijaya.

pegawai dan masyarakat sekitar. Program pendidikan dan keberlanjutan mendapat manfaat dari transfer pengetahuan antara desainer dan komunitas lokal di daerah tersebut. Partisipasi dalam rencana keberlanjutan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ini mengacu pada pemeliharaan program setelah akhir program. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga dapat menjadi indikasi bahwa acara tersebut diterima dengan baik tanpa adanya protes atau perlawanan dari masyarakat. Jika kegiatan tersebut mempromosikan identitas budaya masyarakat setempat selain identitas budaya, maka kegiatan tersebut disebut pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari interaksi antara penyelenggara proyek dan masyarakat setempat. Selain itu, identitas budaya diperlukan untuk memperkuat komunitas lokal.

Indikator pilar lingkungan mengacu pada, lingkungan sehat bagi manusia, yang mengacu pada kesehatan lingkungan manusia, khususnya masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, kegiatan pembangunan berkelanjutan harus menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian, penggunaan sumber daya alam terbarukan secara rasional dan penggunaan sumber daya alam secara rasional termasuk dalam aspek konservasi. Dengan kata lain, salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, yang juga dapat disebut ekonomis. Yang terakhir adalah konservasi sumber daya tak terbarukan, yang mengacu pada konservasi sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak dan gas alam. Melindungi sumber daya alam tak terbarukan adalah salah satu prioritas dunia untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.3 : Indikator Persilangan Faktor Hambatan Kerjasama Lingkungan dengan Triple Bottom Line

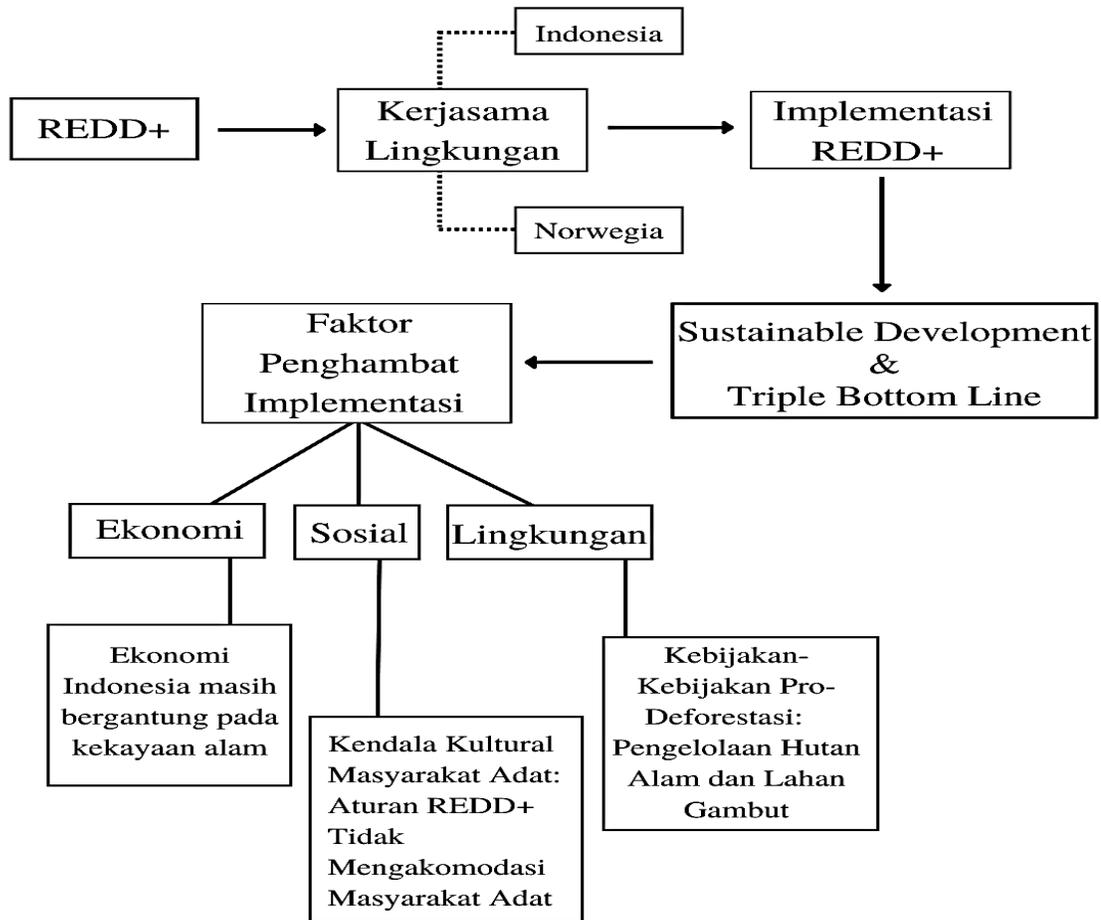
Pilar Triple Bottom Line	Indikator	Efektif/Tidak Ada Hambatan	Tidak Efektif/Ada Hambatan
Ekonomi dan Pemerintahan	Surat Pernyataan Niat	Pembuatan LoI sesuai dengan kesepahaman serta kesamaan tujuan.	Adanya ketidakpahaman dalam menjalankan kerjasama.
	Komitmen	Menjalankan program kerja sesuai dengan yang sudah disepakati, dengan harapan capaian yang sesuai.	Melewatkan beberapa hal dalam menjalankan komitmen.
	Dana kesepakatan	Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, serta masyarakat adat sekitar.	kurangnya komunikasi serta kerjasama terhadap masyarakat sekitar.
Sosial	Partisipasi Pihak lain	Adanya kepercayaan satu sama lain, serta menjaga komitmen sesuai kesepakatan.	Adanya ketidakpercayaan satu dengan yang lain.
	Hubungan Timbal Balik	Tercapainya hasil yang telah disepakati, terjadinya perubahan dalam hal hal pokok dalam lingkungan (Pengurangan dalam Emisi GRK, Deforestasi, dan Degradasi).	Tidak adanya hasil dalam kerjasama.
	Hasil Nyata	Pencairan dana sesuai yang sudah disepakati.	Kurang maksimal dalam pencairan dana kesepakatan.
Lingkungan	Undang undang dan peraturan pemerintah	Adanya dukungan melalui peraturan perundang undangan yang dibuat oleh	Tidak adanya Undang undang dalam menjalankan kerjasama.

		pemerintah, mengenai pengurangan deforestasi dan degradasi.	
	Terjadi krisis dunia saat jalannya kerjasama	Tidak Terdapat Kejadian Internasional yang berpengaruh.	Terdapat Kejadian Internasional yang berpengaruh.

Penulis menghubungkan antara jalannya kerjasama, agar mengetahui secara rinci jawaban dari rumusan masalah. dalam hal ini efektifitas kerjasama lingkungan antara Indonesia - Norwegia melalui implementasi REDD+ diukur melalui Surat pernyataan niat, komitmen, partisipasi pihak lain, hubungan timbal balik, hasil nyata, pendanaan, krisis yang terjadi, dan UU/ Peraturan Pemerintah.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis membentuk sistematika pemikiran sebagai berikut. Dalam menjawab rumusan masalah terkait Apa saja faktor yang menghambat Implementasi REDD+ dalam kerjasama Indonesia-Norwegia, penulis menggunakan konsep Kerjasama Internasional untuk menjelaskan bagaimana kerjasama kedua negara dapat tercapai, serta Sustainable Development dan Triple Bottom Line sebagai

sarana pengantar untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, teori Triple bottom line melalui pilarnya yaitu, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membantu menentukan apa saja hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara Indonesia-Norwegia ini. Melihat kondisi yang ada dan dihubungkan oleh 3 pilar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat jalannya kerjasama ini seperti, peraturan pengolahan hutan, kondisi ekonomi yang tergantung dengan alam, hingga kondisi masyarakat sekitar yang tak terakomodir oleh peraturan.

1.6 Argumen Utama

REDD+ menjadi program yang andal untuk memecahkan masalah deforestasi di seluruh dunia. Sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi dibedakan, implementasi indikator REDD+ mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan Norwegia dalam kerjasama lingkungan. Kedua negara kemudian menjalin hubungan bilateral untuk membantu Indonesia mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca melalui implementasi langkah mekanisme REDD+. Program yang berjalan ini juga mendorong adanya pembangunan berkelanjutan, dilihat dari serangkaian fase yang ada dalam kerjasama ini. Selain itu teori triple bottom line membantu terwujudnya pembangunan berkelanjutan sendiri melalui 3 pilar utamanya. selain membantu dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melalui 3 pilar tersebut dapat diperlihatkan faktor penghambat dalam jalannya kerjasama ini. melalui sisi ekonomi, seperti yang kita ketahui salah satu penghasilan terbesar indonesia berasal dari kekayaan alam yang ada. lalu pada lingkungan, pengelolaan perundang undangan mengenai perlindungan hutan dan

pengelolaan lahan gambut belum seberapa membantu dalam pengurangan deforestasi. selain itu pada kehidupan sosial, kurangnya akomodasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar hutan serta masyarakat adat menjadi salah satu faktor penghambat dalam jalannya kerjasama ini

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yang secara teoritis digunakan untuk menjelaskan fenomena, dilengkapi dengan data dan deskripsi rinci tentang apa yang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan rangkuman yang komprehensif tentang masalah dan fenomena sehari-hari dari peristiwa tertentu yang dialami oleh individu.³² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari peristiwa yang diteliti. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, karena penulis ingin menjelaskan mengenai faktor yang menghambat dalam kerjasama Indonesia - Norwegia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan skema REDD+ dalam kurun waktu 2011 hingga 2016.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi empiris dengan menggunakan metode tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder

³² Ismail Nurdin dan Sri Hartati., 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan. Pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, website, dan berbagai data yang diperoleh dari organisasi terkait (Silalahi, 2009).³³ Data tersedia dari sumber literatur yang tersedia seperti website resmi Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, website resmi UN REDD+, artikel, buku dan jurnal ilmiah. Laporan tentang topik penelitian, publikasi pemerintah, dan media lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh asumsi tertulis dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019), Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena Sedalam mungkin dengan mengumpulkan data terdalam Untuk memperjelas pentingnya rincian dan kedalaman data yang disurvei.³⁴ Para peneliti telah menggabungkan kasus Norwegia menjadi satu studi kasus (kasus individu). Penelitian tentang fenomena diplomasi lingkungan. Metode pemrosesan pribadi Studi kasus adalah untuk digunakan. Menafsirkan Menerapkan teori umum pada peristiwa tertentu.

³³ Silalahi, U., 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

³⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati., 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan waktu. Jangkauan pada penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2016, dimana pada rentang tahun tersebut terjadi beberapa perubahan serta kondisi lingkungan yang cukup mempengaruhi kondisi kerjasama antara Norwegia dan Indonesia melalui skema REDD+. Agar penelitian ini terfokus pada satu hal maka penulis membatasi bidang permasalahan yang diambil terbatas pada apa saja yang menjadi penghambat jalannya kerjasama antara Indonesia Dengan Norwegia di bidang lingkungan hidup ditinjau melalui perkembangan program program yang sudah disetujui. Dalam penelitian ini tidak membahas bidang-bidang kerjasama lain antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Sementara pembatasan lokasi dimaksudkan agar penelitian ini terfokus pada satu lokasi penelitian saja. Penulis memilih batasan lokasi di Indonesia. Karena implementasi kerjasama yang dilakukan dua negara lebih berkonsentrasi di wilayah Indonesia.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian secara substansi memberikan pemahaman secara terorganisasi dan penelitian mencakup dari bab 1 sampai bab 4:

Bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka berfikir yang disertai dengan sintesa

pemikiran, dan argumen utama penulis serta metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab II berisi Beberapa sub-bab, secara umum menjelaskan kerjasama Indonesia-Norwegia, lalu implementasinya terhadap REDD+ dengan pembagian sub-bab antara lain **1)** Kerjasama Indoneisa-Norwegia; **2)** Implementasi REDD+ dalam kerjasama; **3)** Dampak kerjasama Indoneisa-Norwegia.

Bab III berisi penjelasan mengenai faktor penghambat jalannya program-program yang dilaksanakan, serta analisa Kegagalan dan keberhasilan Program yang dilaksanakan.

Bab IV berisi analisis singkat penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran